

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

¹ Hilda Sasnia Karinta*, ² Dedi Rusdi

¹ S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

² Dosen Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

hilda.sasniah@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan dalam pemerintahan di daerah untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah, selain itu pengukuran kinerja keuangan juga dapat dijadikan tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah pada periode selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kinerja keuangan daerah terutama pada Kabupaten Batang. Dengan menganalisis kinerja keuangan pada tahun 2019-2021 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian. Untuk keperluan tersebut, dilakukan pengamatan dan pengumpulan data telah dilakukan selama 4 bulan magang di BPKPAD Kab. Batang mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel tiga tahun terakhir yaitu pada laporan keuangan tahun 2019-2021. Dengan populasi dalam objek penelitian adalah laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Metoda pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, studi kepustakaan.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian*

ABSTRACT

Regional Financial Performance is very much needed in regional government to assess regional government accountability, besides that financial performance measurement can also be used as a benchmark for improving regional government performance in the next period. This study aims to find out how regional financial performance is managed, especially in Batang Regency. By analyzing financial performance in 2019-2021 seen from: (1) Fiscal Decentralization Degree Ratio, (2) Regional Financial Independence Ratio, (3) PAD Effectiveness Ratio, (4) Regional Financial Efficiency Ratio, and (5) Harmony Ratio. For this purpose, observations and data collection have been carried out for 4 months of apprenticeship at BPKPAD Kab. Batang starting from February 2022 to June 2022. This research uses a quantitative descriptive method by taking samples of the last three years, namely in the financial reports for 2019-2021. The population in the object of research is the financial statements of the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency. Methods of data collection by observation, documentation, literature study.

Keywords: *Regional Financial Performance, Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio*

PENDAHULUAN

Dengan tercatatnya dalam undang-undang tentang otonomi daerah maka pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan seluruhnya baik dari alam maupun manusianya di seluruh penjuru daerahnya. Pengukuran kinerja keuangan sangatlah penting dalam suatu pemerintahan di daerah untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah tersebut selama melakukan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah tersebut. Selain itu pengukuran kinerja dapat dijadikan tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah pada periode selanjutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu gambaran dari kondisi keuangan sebuah badan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan cara tertentu seperti realisasi pendapatan dan belanja suatu daerah.

Analisis pada kinerja keuangan pemerintahan suatu daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah dapat dilihat dari realisasi pendapatan dan anggaran suatu daerah. Apabila realisasinya dapat melebihi anggaran atau target maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan telah berjalan dengan baik. Namun bukan hanya melihat dari realisasi pendapatan daerah yang telah melebihi target anggaran perlu diperhatikan lebih lanjut untuk komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Dalam laporan keuangan daerah rasio merupakan suatu angka yang dapat menunjukkan keterkaitan antara suatu unsur satu dengan unsur lainnya. Rasio juga dapat menggambarkan keterkaitan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Dengan adanya rasio maka dapat memberikan informasi mengenai gambaran keadaan atau posisi suatu keuangan daerah. Maka untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan beberapa rasio seperti : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari magang pada BPKPAD Kab. Batang adalah mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang telah berjalan dari tahun 2019-2021.

KAJIAN PUSTAKA

a. Laporan Keuangan Daerah

Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan suatu komponen penting yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu periode setahun. Dalam PSAK No.1 Tahun 2017 laporan keuangan adalah penyajian yang tersusun dari adanya posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam suatu entitas. Menurut Bastian (2006) laporan keuangan adalah “laporan

keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengungkapkan bahwa laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang harus relevan tentang suatu posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah terjadi dalam suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menerangkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Maka setiap pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangannya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Peraturan pemerintah telah mengungkapkan tentang standar akuntansi pemerintahan khususnya lampiran I SAP basis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk agar dapat menyajikan laporan keuangan dengan secara wajar dan dilaporkan secara lengkap dan rinci agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan maka akan terbentuk transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai dengan harapan.

Tujuan Laporan Keuangan Daerah

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan laporan keuangan tercantum Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) tahun 2021. Laporan keuangan memiliki peran prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan yang berkelanjutan, dengan sumber daya yang dihasilkan dari kegiatan yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Komponen Laporan Keuangan Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah selama satu periode yang didalamnya menjelaskan secara rinci antara anggaran dan realisasinya. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam buku panduan SAP tahun 2021 menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur berikut :

- a. Pendapatan LRA merupakan keseluruhan penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah suatu penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus/defisit LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- e. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan, obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- f. Pengeluaran pembiayaan merupakan semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah yang berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan
- g. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu periode tahun anggaran tertentu.
- h. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran merupakan suatu selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menerangkan bahwa adanya informasi akan adanya perubahan saldo anggaran lebih apakah naik atau turun dengan membandingkan pelaporan pada tahun sebelumnya. Berikut unsur-unsur dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih :

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain
- f. Saldo anggaran lebih akhir tahun

3. Neraca

Neraca merupakan suatu komponen laporan keuangan dengan menggambarkan

posisi keuangan perusahaan yang tersusun dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang tersusun secara sistematis pada tanggal tertentu sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan.

Beberapa unsur pada neraca :

- 1) Aset merupakan sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh suatu pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan dengan berharap dapat diperoleh baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang muncul dari adanya peristiwa pada masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menjelaskan ikhtisar dari sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dengan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Beberapa unsur dalam laporan operasional :

- 1.) Pendapatan LO merupakan suatu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2.) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3.) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4.) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan hasil operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menjelaskan informasi kas berdasarkan dengan adanya aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Beberapa unsur laporan arus kas dengan definisi masing-masing (Riyanti 2017)

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menerangkan informasi mengenai kenaikan atau penurunan dari ekuitas tahun pelaporan dengan membandingkan laporan pada tahun sebelumnya. Unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas :

- a. Ekuitas awal;

- b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambahkan atau mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi mendasar, contohnya :
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan penjelasan deskriptif atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang kebijakan dalam akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan salah satu dasar bagi seseorang untuk mencapai kinerja yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia sangatlah penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga suatu laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu (Putriasri:2017). Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi maka tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Bukan hanya itu saja hasil pekerjaan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan kompetensi maka seseorang pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik dan waktu yang dibutuhkan sangatlah sedikit. Namun selain kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah juga memiliki peran yang besar terhadap kualitas dari laporan keuangan (Putriasri:2017).

Maka dengan adanya kompetensi seseorang akan terus belajar untuk memperbarui pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki. Semisal seseorang yang kurang mahir dalam menginput laporan keuangan ia akan berusaha dan belajar dalam menekuni dan memahami tahapan-tahapan dalam penginputan data.

c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan suatu instrumen paling penting dalam suatu pemerintahan daerah. Tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 mengenai APBD dimana APBD merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.

Menurut Dr. Rudi Badrudin (2017:98) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan

perundangan yang disebut Peraturan Daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014) APBD merupakan suatu rencana keuangan daerah yang menjelaskan secara detail mengenai perkiraan pengeluaran dan sumber pendapatan dari suatu daerah untuk merancang pembiayaan suatu kegiatan dan proyek daerah selama satu periode.

Dalam peraturan Bupati Kabupaten Batang tahun 2022 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan dari pendapatan daerah. APBD tersusun dengan mengacu pada pedoman KUA, PPAS yang didasarkan pada RKPD, APBD sendiri memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD terdiri dari tiga unsur utama yaitu :

1. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan dalam bentuk uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
3. Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

c.1. Tahapan Penyusunan APBD

Penyusunan APBD tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah.
2. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
4. Penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD.
5. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
6. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
8. Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.
9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.
12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.
13. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

c.2. Prinsip Penyusunan APBD

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan untuk sasaran tertentu yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Maka dalam menyiapkan rancangan APBD dengan adanya eksekutif sebagai tim anggaran bersama DPRD menyusun KUA PPAS yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Prinsip-prinsip penyusunan APBD untuk setiap tahunnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang bisa memberikan arahan kepada daerah dalam mengalokasikan belanjanya APBD bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2019 terdapat prinsip dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, dan;
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat.

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

1. Metoda

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini dengan menggunakan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang terdiri dari banyaknya angka dari Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Batang.

Sumber data yang diambil dalam analisis penelitian kali ini dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yang berhubungan dengan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019-2021.

Dalam penelitian kali ini menggunakan metoda observasi, dokumentasi, studi kepustakaan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan

secara langsung mengenai obyek yang sedang diteliti dan melakukan pendataan secara cermat, teliti, dan sistematis. Metoda dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menyalin file laporan keuangan Kabupaten Batang tahun 2019-2021 dan profil dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, sehingga mengambil informasi penelitian atau obyek dari beberapa dokumen atau catatan dari kejadian yang sudah terjadi baik dalam bentuk tulisan maupun sebuah arsip dari suatu instansi. Selain itu juga menggunakan metoda studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari sumber pustaka untuk mendukung penelitian ini.

2. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal

Merupakan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Tabel 5.5.1 Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Skala interval derajat desentralisasi fiskal %	Kemampuan keuangan daerah
00,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

TPDt

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

2. Rasio Kemandirian

Menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5.5.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian %	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007 : 169)

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus

$$RKKPD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas PAD

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektif PAD :

- a. Apabila nilai kurang dari 100% (x <100%) maka tidak efektif
- b. Apabila nilai sama dengan 100% (x = 100%) maka efektivitas berimbang
- c. Apabila nilai lebih dari 100% (x > 100%) maka hasilnya efektif

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan adanya realisasi pendapatan yang diterima.

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.5.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria efisiensi	Presentase efisiensi
100% keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber : Abdul Halim (2007 : 234)

5. Rasio Keserasian

Menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasidana pada belanja operasi dan belanja modal secara maksimal.

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Namun pada rasio keserasian belum ada ukuran yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal karena pada rasio ini sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam penelitian ini untuk mengetahui suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau suatu kegiatan dalam periode waktu tertentu dan memiliki tujuan tertentu. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pertanggung jawaban. Dengan adanya indikator penilaian kinerja maka organisasi itu dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil di periode mendatang.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan seberapa besar peran pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatam Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKPAD Kab. Batang = 2019

$$\begin{aligned} DDF &= \frac{PADt}{TPDt} \times 100\% \\ &= \frac{245.836.087.092,28}{1.769.958.202.416,28} \times 100\% \\ &= 13,88\% \end{aligned}$$

2020

$$\begin{aligned} DDF &= \frac{PADt}{TPDt} \times 100\% \\ &= \frac{257.422.866.095,46}{1.733.087.893.276,46} \times 100\% \\ &= 18,45\% \end{aligned}$$

2021

$$\begin{aligned} DDF &= \frac{PADt}{TPDt} \times 100\% \\ &= \frac{322.789.372.917,64}{1.821.822.580.994,64} \times 100\% \\ &= 17,71\% \end{aligned}$$

Tabel 6.1 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal BPKPAD Kab.Batang Tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	DDF	Kemampuan Keuangan
2019	245.836.087.092,28	1.769.958.202.416,28	13,88%	Kurang
2020	257.422.866.095,46	1.733.087.893.276,46	14,85%	Kurang
2021	322.789.372.917,64	1.821.822.580.994,64	17,71%	Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6.1 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BPKPAD Kab. Batang jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang maka kemampuan keuangan BPKPAD Kab.Batang masih berada dibawah skala interval 10,01-20,00%. Pada tahun 2019 rasio derajat desentralisasi fiskal mendapatkan 13,88%, tahun 2020 sebesar 14,85% dan ditahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 17,71%.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam menangani sendiri kegiatan pemerintah dalam pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKPAD Kab. Batang = 2019

$$\begin{aligned} \text{RKKD} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \\ &= \frac{245.836.087.092,28}{1.444.647.049.585} \times 100\% \\ &= 17,01\% \end{aligned}$$

2020

$$\begin{aligned} \text{RKKD} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \\ &= \frac{257.422.866.095,46}{1.395.005.131.783} \times 100\% \\ &= 18,45\% \end{aligned}$$

2021

$$\begin{aligned} \text{RKKD} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \\ &= \frac{322.789.372.917,64}{1.419.276.630.191} \times 100\% \\ &= 22,74\% \end{aligned}$$

Tabel 6.2 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKPAD Kab.Batang tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Pola Hubungan
2019	245.836.087.092,28	1.444.647.049.585,00	17,01%	Instruktif
2020	257.422.866.095,46	1.395.005.131.783,00	18,45%	Instruktif
2021	322.789.372.917,64	1.419.276.630.191,00	22,74%	Instruktif

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemampuan keuangan BPKPAD Kab. Batang tergolong masih Sangat Rendah dan pola hubungannya termasuk dalam pola hubungan Instruktif. Namun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2019 mendapatkan 17%, mengalami kenaikan 1,45% di tahun 2020 menjadi 18,45% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tinggi 4,29% menjadi 22,74%.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan penggambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan PAD yang telah disusun dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah. Apabila semakin besar rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio efektivitas PAD memiliki rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD BPKPAD Kab. Batang =
2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{245.836.087.092,28}{249.192.603.844} \times 100\% \\ &= 98,6\% \end{aligned}$$

2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{257.422.866.095,46}{225.961.233.297} \times 100\% \\ &= 113\% \end{aligned}$$

2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{322.789.372.917,64}{273.916.141.117} \times 100\% \\ &= 117\% \end{aligned}$$

Tabel 6.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD BPKPAD Kab. Batang Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	REPAD	Kriteria
2019	245.836.087.092,28	249.192.603.844,00	98,60%	Tidak Efektif
2020	257.422.866.095,46	225.961.233.297,00	113%	Efektif
2021	322.789.372.917,64	273.916.141.117,00	117%	Efektif

Berdasarkan tabel 6.3 dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD BPKPAD Kab. Batang tahun 2019 Tidak Efektif dengan nilai yang diperoleh 98,6% sebab pada tahun tersebut anggaran PAD lebih besar dari realisasi PAD sehingga pada tahun 2019 dikategorikan Tidak Efektif, namun dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan menjadi Efektif. Di tahun 2020 mendapatkan nilai 113% dan pada tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 117%.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi keuangan daerah menguraikan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio efisiensi keuangan daerah memiliki rumus sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKPAD Kab. Batang =
2019

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.431.034.432.119}{1.769.958.202.416,28} \times 100\%$$

$$= 80,85\%$$

2020

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.349.573.485.518,19}{1.733.087.893.276,46} \times 100\%$$

$$= 77,8\%$$

2021

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.440.336.907.917}{1.821.822.580.994,64} \times 100\%$$

$$= 79\%$$

Tabel 6.4 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKPAD Kab. Batang Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	REKD	Kriteria
2019	1.431.034.432.119,00	1.769.958.202.416,28	80,85%	Cukup Efisien
2020	1.349.573.485.518,19	1.733.087.893.276,46	77,87%	Efisien
2021	1.440.336.907.917,00	1.821.822.580.994,64	79,06%	Efisien

Dari tabel 6.4 dapat diketahui dalam Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKPAD Kab. Batang kinerja keuangan dari tahun 2019 sampai 2021 rata-rata tergolong Efisien. Pada tahun 2019 mendapatkan nilai 80,85%, sedangkan untuk tahun 2020 mendapatkan 77,87%, kemudian untuk tahun 2021 mendapatkan 79,06%.

5. Rasio Keserasian

Rasio ini menguraikan bagaimana pemerintah daerah mengutamakan alokasi dana pada belanja operasi dan belanja modal secara baik.

Rasio keserasian memiliki rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

a. Perhitungan Rasio Belanja Operasi BPKPAD Kab. Batang = 2019

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.219.256.192.471}{1.431.034.432.119} \times 100\%$$

$$= 85\%$$

2020

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.175.475.076.933,19}{1.349.573.485.518,19} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasi} &= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.241.149.542.241}{1.440.336.907.917} \times 100\% \\ &= 86,1\% \end{aligned}$$

6.5.1 Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi BPKPAD Kab. Batang Tahun 2019-2021

Tahun	Total Belanja Operasional	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasional
2019	1.219.256.192.471,00	1.431.034.432.119,00	85,2%
2020	1.175.475.076.933,19	1.349.573.485.518,19	87,09%
2021	1.241.149.542.241,00	1.440.336.907.917,00	86,17%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas bahwa Rasio Belanja Operasi BPKPAD Kab. Batang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 mendapatkan nilai 85,2%, sedangkan tahun 2020 mendapatkan 87,09% dan di tahun 2021 mendapatkan penurunan dengan hasil 86,17%.

b. Perhitungan Rasio Belanja Modal BPKPAD Kab. Batang =
2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{211.778.239.648}{1.431.034.432.119,00} \times 100\% \\ &= 14,79\% \end{aligned}$$

2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{152.870.895.295}{1.349.573.485.518,19} \times 100\% \\ &= 11,32\% \end{aligned}$$

2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{196.084.228.826}{1.440.336.907.917,00} \times 100\% \\ &= 13,61\% \end{aligned}$$

6.5.2 Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal BPKPAD Kab. Batang Tahun 2019-2021

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2019	211.778.239.648,00	1.431.034.432.119,00	14,79%
2020	152.870.895.295,00	1.349.573.485.518,19	11,32%
2021	196.084.228.826,00	1.440.336.907.917,00	13,61%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa Rasio Belanja Modal BPKPAD Kab. Batang selama tiga tahun. Di tahun 2019 mendapatkan nilai 14,79%, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan dengan mendapatkan nilai 11,32%, dan pada tahun 2021 mendapatkan 13,61%.

6.6 Rasio Kinerja Keuangan Daerah

No	Rasio	Kriteria		
		2019	2020	2021
1	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kurang	Kurang	Kurang
2	Kemandirian Keuangan Daerah	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
3	Efektivitas PAD	Tidak Efektif	Efektif	Efektif
4	Efisiensi Keuangan Daerah	Cukup Efisien	Efisien	Efisien
5	Keserasian	Belum Stabil	Belum Stabil	Belum Stabil

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 6.1 dapat dilihat bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Batang masih dikategorikan Kurang selama tiga tahun karena masih dalam skala interval 10,01%-20,00% meskipun tiap tahun dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan jika dilihat dari perhitungan diatas. Namun dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Batang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Selain itu keterlibatan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki kontribusi yang besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Batang. Pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Oleh sebab itu untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat berupaya meningkatkan PAD dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah selama tiga tahun pada Pemerintah Kabupaten Batang memiliki rata-rata kemandirian daerahnya masih tergolong Rendah dan dalam kategori Kemampuan Keuangan Kurang dalam pola hubungan Instruktif sehingga peran pemerintah pusat atau provinsi masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah maka pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan tepat. Dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0%-25% sehingga pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat bergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam segi kemandirian keuangan BPKPAD Kabupaten Batang secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, maka dapat menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Terlebih kesadaran dan keikutsertaan masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu penyebab PAD yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Batang masih sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi

pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, pendirian BUMD sektor potensial.

3. Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas Kinerja Keuangan Kab.Batang sudah Efektif sebab rata-rata efektivitasnya sudah mencapai 109,53% dimana dikatakan baik pada interval lebih dari 100% maka kinerja keuangan BPKPAD sudah berjalan secara Efektif. Hal ini disebabkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sudah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Batang dalam efektivitas PAD memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Namun dalam mempertahankan kinerja yang baik pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Batang.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah Kab.Batang dalam Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien. Karena rata-rata di skala interval 60-80%. Maka kinerja keuangan daerah jika dihitung dengan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah dikatakan cukup baik dimana jumlah realisasi belanja daerah dari tahun 2019 sampai 2021 lebih kecil dari total realisasi pendapatan daerah yang artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Batang sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

5. Rasio Keserasian

Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal memiliki nilai yang belum stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6.5.1 dan 6.5.2 bahwa sebagian besar dana pemerintah daerah Kab. Batang masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga nilai yang didapatkan pada belanja modal relatif kecil besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan banyaknya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji. Sehingga Pemerintah Kab.Batang lebih mengutamakan pada pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

Pada rasio keserasian belum ada ukuran yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena pada rasio ini sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Dari rasio diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Batang dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah mendapatkan hasil yang cukup baik dimana pada Rasio Efektivitas PAD realisasi PAD sudah melebihi dari anggaran yang artinya pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan PAD yang telah disusun dan telah terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah. Sedangkan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga sudah baik yang artinya pemerintah daerah Kabupaten Batang sudah berhasil menekan jumlah belanja daerah dan sudah mampu dalam menerapkan efisiensi anggaran belanja daerah. Kemudian pada Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian masih dikategorikan kurang

karena pada Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah belum mampu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Lalu pada Rasio Kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat kurang dan masih bergantung bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Kemudian pada Rasio Keserasian mendapatkan hasil yang belum stabil tiap tahunnya karena pada rasio ini belum ada ukuran yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal sebab rasio ini sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang telah diteliti pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kantor Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan BPKPAD Kabupaten Batang apabila dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang karena berada dalam skala interval 10,01-20,00% secara berturut-turut dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dengan rasionya masih-masing sebesar 13,88%; 14,85%; 17,71%.
2. Kinerja Keuangan BPKPAD Kabupaten Batang apabila dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama tiga tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tergolong Rendah Sekali dengan pola hubungannya termasuk pola Instruktif dengan skala intervalnya 0-25%. Dengan masing-masing rasionya sebesar 17%; 18,45%; 22,74%.
3. Kinerja Keuangan BPKPAD Kabupaten Batang apabila dilihat dari Rasio Efektivitas PAD bahwa efektivitas keuangan BPKPAD Kabupaten Batang tahun 2019 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% yaitu sebesar 98,6%. Namun di tahun 2020 sampai 2021 sudah Efektif dengan nilai yang diperoleh lebih dari 100% yaitu sebesar 113%; dan 117%.
4. Kinerja Keuangan BPKPAD Kabupaten Batang apabila dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Batang tahun 2019 mendapatkan nilai 80,85% atau dapat dikatakan Cukup Efisien. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 dikatakan Efisien dengan masing-masing rasio sebesar : 77,87%; dan 79,06%.
5. Kinerja Keuangan BPKPAD Kabupaten Batang jika dilihat Rasio Keserasian belum stabil dari tahun ke tahun. Pengeluaran untuk belanja operasi lebih besar dibandingkan untuk pengeluaran belanja modal. Untuk besarnya Rasio Belanja Operasi selama tahun 2019 sampai tahun 2021 masing-masing rasio sebesar : 85,2%; 87,09%; dan 86,17%. Sedangkan untuk besarnya Rasio Belanja Modal dengan masing-masing rasionya adalah : 14,79%; 11,32%; dan 13,61%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung,Tut Madiguna.2018.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,17.12
- Anshori,Zakaria.2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) Volume 4 No. 2, Juni 2019
- Djollong,Andi Fitriani.2014. Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif (Technique Of Quantitative Research). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah ParepareVolume II Nomor 1
- Effendi,Dr Syahril.2021.Akuntansi Keuangan SKPD/SPKPD (PPKD) Pemerintah Daerah.Cv Batam Publisher
- Fikrian,Hafiza.2017. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). JOM Fekon, Vol. 4. No. 1.
- Jauhari,Hadi.2021. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Akuntansi, Vol 8 No. 1
- Kartopawiro,Sardio.2018. Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.16 (1), 2
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.2021.Standar Akuntansi Pemerintah
- Mahaputra,I Putu Upabayu Rama.2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2
- Malsyuri.2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jurnal Visioner & Strategis Volume 6, Nomor 1
- Masnila,Nelly.2021.Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.CV Mitra Cendekia Media
- Mokodompit,Paramitha Sandy.2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1521-1527
- Neilana,Tri.2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5 (2)
- Octariani,Devie.2017. Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Anggaran Skpd (Suatu Pengujian Struktural). Riset Akuntansi dan Keuangan

Indonesia, 2(1)

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 72 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Permana, I Gede Yoga. 2020. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar.

Pujanira, Putriasri. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 2*

Putri, Rizki Sari Eka. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajem, Ekonomi, Akuntansi) Vol. 5 No. 3*

Soleha, Nurhayati. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1*

Syahputri, Lia Lindri. 2020. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2019). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta*

Toding, Merlina. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3*

Yuliasuti, K. 2017. Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4*

Zuhri, Muhammad. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review*